



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAKMUR MARBUN**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **432375**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.940.612.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.061.412.000
2. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 243.200.000
3. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 214.032.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 475.488.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/78 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 284.000.000
6. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 315.952.000
7. Tanah Seluas 272 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 346.528.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 910.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 108.750.500

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 641.129.023



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.600.491.523
III. HUTANG	Rp.	661.259.744
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.939.231.779

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.